

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan keuangan negara di Indonesia dikuasai oleh presiden selaku kepala pemerintahan. UU Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara, dan dalam rangka penyelenggaraannya, setiap tahun disusunlah APBN dan APBD. Pengelolaan keuangan tersebut oleh presiden dikuasakan kepada menteri keuangan, menteri atau pimpinan lembaga pengguna anggaran, serta diserahkan kepada kepala pemerintahan daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota.

Keuangan yang pengelolaannya diserahkan kepada kepala daerah ialah keuangan daerah, yang menurut PP Nomor 12 Tahun 2019, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah ialah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah, dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat (Mohamad Khusaini, 2018:2).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan didanai dari APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang adalah

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat (Hendra, 2017:1-2).

Oleh karena pengelolaan keuangan daerah penting untuk memajukan kesejahteraan, maka pengelolaan keuangan daerah pun harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan. Pengelolaan yang baik dapat dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip, salah satunya ialah prinsip *value for money*. Penerapan *value for money* perlu diperhatikan karena organisasi sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik berdasarkan tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Elemen pertama, ekonomi, terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisasi *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Elemen kedua, efisiensi, terkait penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu. Elemen ketiga, efektivitas, terkait dengan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan (Mardiasmo, 2017:4).

Pengelolaan keuangan berdasarkan *value for money* seharusnya diterapkan pada setiap tahapan pengelolaan, baik dalam penyusunan anggaran maupun dalam pelaksanaannya. Edy (2019) menjelaskan bahwa dengan *value for money*, alokasi anggaran publik diarahkan untuk memberikan nilai manfaat yang sebesar-

besarnya untuk masyarakat. Selanjutnya dalam pelaksanaan anggaran sektor publik, untuk melaksanakan kegiatan dengan jumlah dan mutu tertentu, sumber daya yang akan digunakan sebisa mungkin didapatkan dengan harga yang terendah atau wajar.

Selain menerapkan *value for money* dalam pengelolaan keuangan, penerapan *value for money* tersebut juga perlu diukur agar dapat dievaluasi dan diperbaiki di kemudian hari. April Wulandari (2017) mengukur *value for money* menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas pada pemerintah provinsi se-Indonesia untuk tahun anggaran 2012-2015 dengan hasil pada Tabel 1.1 dengan kriteria ekonomi: kurang dari 100% berarti ekonomis dan lebih dari 100% berarti tidak ekonomis, lalu kriteria efisiensi: lebih dari 100% berarti tidak efisien, 90%-100% berarti kurang efisien, dan 80%-90% berarti cukup efisien, serta kriteria efektivitas: lebih dari 100% berarti sangat efektif, 90%-100% berarti efektif, dan 80%-90% berarti cukup efektif. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa rata-rata nasional tingkat ekonomi dan tingkat efektivitas sudah mencapai ekonomis dan efektif, sedangkan rata-rata nasional tingkat efisiensi masih kurang efisien.

Tabel 1.1
Perbandingan Rasio *Value for Money* Pemerintah Provinsi Se-Indonesia
Tahun Anggaran 2012-2015

No.	Nama Provinsi	Rata-Rata Rasio		
		Ekonomi	Efisiensi	Efektivitas
1	Acch	93,10 (ekonomis)	100,98 (inefisien)	99,20 (efektif)
2	Sumatera Utara	86,54	104,64	88,19

		(ekonomis)	(inefisien)	(cukup efektif)
3	Sumatera Barat	93,31 (ekonomis)	97,61 (kurang efisien)	101,26 (sangat efektif)
4	Riau	73,88 (ekonomis)	96,55 (kurang efisien)	101,78 (sangat efektif)
5	Jambi	90,96 (ekonomis)	102,20 (inefisien)	107,70 (sangat efektif)
6	Sumatera Selatan	90,32 (ekonomis)	92,08 (kurang efisien)	94,62 (efektif)
7	Bengkulu	92,44 (ekonomis)	99,61 (kurang efisien)	101,00 (sangat efektif)
8	Lampung	85,73 (ekonomis)	93,34 (kurang efisien)	90,44 (efektif)
9	Kep. Bangka Belitung	86,22 (ekonomis)	98,96 (kurang efisien)	99,54 (efektif)
10	Kepulauan Riau	90,94 (ekonomis)	95,22 (kurang efisien)	99,35 (efektif)
11	DKI Jakarta	74,25 (ekonomis)	92,36 (kurang efisien)	86,97 (cukup efektif)
12	Jawa Barat	89,65 (ekonomis)	97,65 (kurang efisien)	106,81 (sangat efektif)
13	Jawa Tengah	93,45 (ekonomis)	99,70 (kurang efisien)	101,30 (sangat efektif)
14	DIY	80,34 (ekonomis)	90,70 (kurang efisien)	95,10 (efektif)
15	Jawa Timur	95,48 (ekonomis)	97,84 (kurang efisien)	104,15 (sangat efektif)
16	Banten	85,70 (ekonomis)	88,80 (cukup efisien)	100,17 (sangat efektif)
17	Bali	87,61 (ekonomis)	97,73 (kurang efisien)	106,41 (sangat efektif)
18	NTB	91,90 (ekonomis)	97,20 (kurang efisien)	94,60 (efektif)
19	NTT	93,75 (ekonomis)	98,30 (kurang efisien)	91,53 (efektif)
20	Kalimantan Barat	94,40	97,40	101,30

		(ekonomis)	(kurang efisien)	(sangat efektif)
21	Kalimantan Tengah	91,10 (ekonomis)	97,90 (kurang efisien)	101,20 (sangat efektif)
22	Kalimantan Selatan	90,54 (ekonomis)	104,625 (kurang efisien)	99,56 (efektif)
23	Kalimantan Timur	90,81 (ekonomis)	90,60 (kurang efisien)	94,48 (efektif)
24	Kalimantan Utara	100,74 (inekonomis)	112,74 (inefisien)	96,08 (efektif)
25	Sulawesi Utara	88,85 (ekonomis)	95,89 (kurang efisien)	100,65 (sangat efektif)
26	Sulawesi Tengah	86,10 (ekonomis)	98,76 (kurang efisien)	92,12 (efektif)
27	Sulawesi Selatan	92,62 (ekonomis)	101,26 (inefisien)	96,40 (efektif)
28	Sulawesi Tenggara	84,51 (ekonomis)	94,50 (kurang efisien)	100,80 (sangat efektif)
29	Gorontalo	92,30 (ekonomis)	100,97 (inefisien)	97,87 (efektif)
30	Sulawesi Barat	90,50 (ekonomis)	92,46 (kurang efisien)	99,88 (efektif)
31	Maluku	89,36 (ekonomis)	102,53 (inefisien)	95,42 (efektif)
32	Maluku Utara	89,34 (ekonomis)	105,41 (inefisien)	92,69 (efektif)
33	Papua	93,13 (ekonomis)	98,10 (kurang efisien)	99,83 (efektif)
34	Papua Barat	93,08 (ekonomis)	98,13 (kurang efisien)	108,48 (sangat efektif)
	Rata-Rata Nasional	89,50 (ekonomis)	98,02 (kurang efisien)	98,44 (efektif)

Sumber: April Wulandari (2017)

Pengukuran pada pelaksanaan *value for money* dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan pengukuran kinerja, sebagaimana disebutkan oleh Mohamad Mahsun (2013:132) bahwa *value for money* merupakan pengukuran

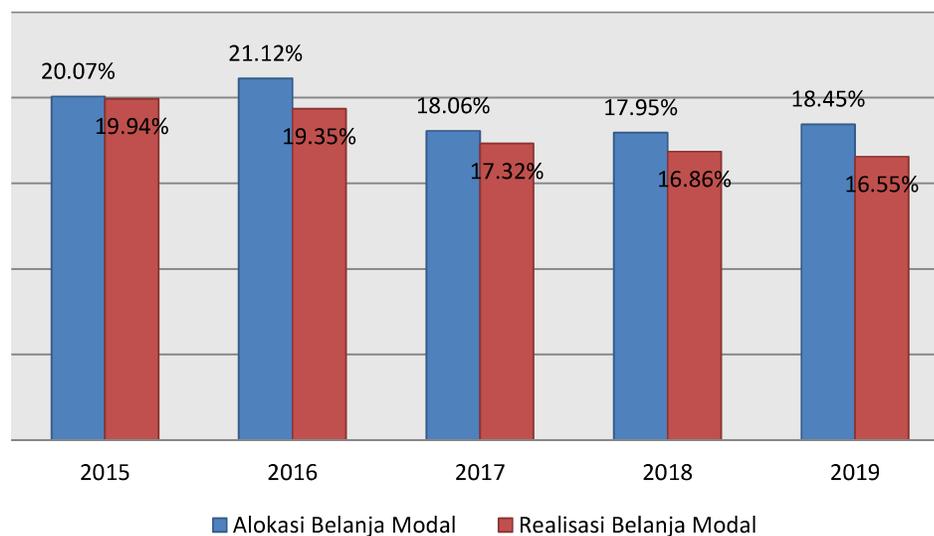
dan pemeriksaan kinerja dengan berdasarkan pada ukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Kinerja keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif menunjukkan bahwa konsep *value for money* telah diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan.

Salah satu manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik ialah alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik (Mardiasmo, 2017:7). Belanja tersebut termasuk di dalamnya ialah belanja dalam rangka pembangunan daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu terlihat dalam laman resmi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Aceh (2019) yang mengutip pernyataan Sekretaris Daerah Aceh, Helvizar Ibrahim, yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada kepentingan publik, di mana belanja modal harus digunakan secara produktif dan pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional.

Menurut Desak & I Gusti (2019) peningkatan belanja modal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebab belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah dapat memperbaiki pelayanan publik sehingga menstimulus perekonomian di daerahnya. Sementara itu, menurut Endy (2019) semakin besar belanja pemerintah yang dialokasikan pada belanja modal, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Belanja modal yang digunakan untuk pembangunan akan memberikan kelancaran pada kegiatan ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pembangunan akan membuka

kesempatan kerja sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan yang meningkat dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2014) menyebutkan bahwa target rata-rata belanja modal provinsi pada tahun 2019 ialah 30%, di mana pada tahun 2014 rata-rata belanja modal provinsi masih di angka 16,2%. Sementara itu, rata-rata alokasi dan realisasi belanja modal provinsi pada tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 1.1 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2019 baik rata-rata alokasi maupun realisasi belanja modal provinsi se-Indonesia masih jauh dari target 30%.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)

Gambar 1.1
Rata-Rata Alokasi dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Tahun 2015-2019

Menurut Mardiasmo (2017:121) pengukuran kinerja sektor publik salah satunya dimaksudkan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dapat memengaruhi alokasi

sumber daya, termasuk alokasi belanja modal. Selanjutnya, pengelolaan keuangan daerah berprinsip *value for money* yaitu ekonomis, efisien, dan efektif merupakan suatu keharusan. Hal ini terdapat dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kinerja keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif seharusnya sudah dapat terpenuhi, sehingga manfaat berupa alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik pun seharusnya tercapai. Namun, rata-rata alokasi belanja modal pemerintah provinsi se-Indonesia masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan masih banyak pemerintah provinsi yang mengalokasikan anggaran untuk belanja modalnya dengan rendah.

Pada penelitian ini, penulis akan mengambil referensi dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Sylvia Febriany Gerungan, David P. E. Saerang, dan Winston Pontoh (2015) menganalisis pengaruh kinerja keuangan termasuk tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, hasilnya tingkat efisiensi berpengaruh negatif signifikan, sedangkan tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.
2. Kadek Martini dan A. A. N. B. Dwirandra (2015) menganalisis pengaruh kinerja keuangan termasuk tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Bali, hasilnya tingkat efisiensi

berpengaruh negatif signifikan, sedangkan tingkat efektivitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal tahun berikutnya.

3. Asepma Hygi Prihastuti, Taufeni Taufik, dan Restu Agusti (2015) menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Riau, hasilnya kinerja keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
4. Lilis Marlina, Mirna Indriani, dan Heru Fahlevi (2017) menganalisis pengaruh kinerja keuangan termasuk tingkat efektivitas terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh, hasilnya tingkat efektivitas berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal .
5. I Ketut Arsa dan Nyoman Djinar Setiawina (2015) menganalisis pengaruh kinerja keuangan termasuk tingkat efektivitas terhadap alokasi belanja modal pada seluruh kabupaten/kota Provinsi Bali, hasilnya tingkat efektivitas berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.
6. Ni Made Deni Indiyanti dan Henny Rahyuda (2018) menganalisis pengaruh kinerja keuangan termasuk tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Bali, hasilnya tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal tahun berikutnya.
7. Kurni Adi Suwandi dan Afrizal Tahar (2015) menganalisis pengaruh kinerja keuangan termasuk tingkat efektivitas terhadap alokasi belanja modal di Provinsi D. I. Yogyakarta, hasilnya tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

8. Havid Sularso dan Yanuar E. Restianto (2011) menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, hasilnya kinerja keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, di mana semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah maka semakin tinggi alokasi belanja modalnya.
9. Muhammad Arif dan Fefri Indra Arza (2019) menganalisis pengaruh kinerja keuangan termasuk tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, hasilnya tingkat efisiensi berpengaruh positif signifikan, sedangkan tingkat efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal tahun berikutnya.
10. Rilo Jatitmas (2015) menganalisis pengaruh rasio keuangan termasuk tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Jawa Tengah, hasilnya tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.
11. Eko Indra Praza (2016) menganalisis pengaruh kinerja keuangan termasuk tingkat efektivitas terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Jambi, hasilnya tingkat efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.
12. Damar Daru Sukmaji dan Abdul Rohman (2019) menganalisis pengaruh kinerja keuangan termasuk tingkat efektivitas terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, hasilnya tingkat efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

13. Muhammad Zulkarnain, Yulina Astuti, dan Erni Wiriani (2019) menganalisis pengaruh rasio keuangan termasuk tingkat efektivitas terhadap belanja modal di Kota Langsa, hasilnya tingkat efektivitas berpengaruh positif terhadap belanja modal.
14. Aula Ahmad Hafidh (2013) menganalisis pengaruh rasio keuangan termasuk tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas terhadap belanja modal di Provinsi D. I. Yogyakarta, hasilnya tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.
15. Riri Zelmianti (2016) menganalisis pengaruh kinerja keuangan termasuk tingkat efektivitas terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia, hasilnya tingkat efektivitas tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal tahun berikutnya.
16. Riko Novianto dan Rafiudin Hanafiah (2015) menganalisis pengaruh kinerja keuangan termasuk tingkat efektivitas terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Kalimantan Barat, hasilnya tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal tahun berikutnya.
17. Julius Tamawiwu, Jullie J. Sondakh, dan Jessy D. L. Warongan (2016) menganalisis pengaruh kinerja keuangan termasuk tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas terhadap belanja modal di Provinsi Sulawesi Utara, hasilnya tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal.

18. Anisya Ayu L., Sri Rahayu, dan Junaidi (2019) menganalisis pengaruh kinerja keuangan termasuk tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Jambi, hasilnya tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.
19. Lufki Laila Nurhidayati dan Rizal Yaya (2013) menganalisis pengaruh tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas terhadap alokasi belanja modal pada 142 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, hasilnya tingkat efisiensi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.
20. Dihan Lucky (2013) menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Timur, hasilnya kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
21. Kornelis Kopong Bolen dan Payamta (2019) menganalisis pengaruh kinerja keuangan termasuk tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, hasilnya tingkat efisiensi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.
22. Abel Nyarko-Asomani, Vijay K. Bhasin, dan Peter B. Aglobitse (2019) menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Ghana, hasilnya belanja modal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

23. Xuhui Cong dan Li Ma (2018) menganalisis kemampuan efisiensi, ekonomi, efektivitas, dan ekuitas untuk mengevaluasi kinerja pada proyek kerja sama antara pemerintah dan swasta untuk renovasi hunian di Tiongkok. Hasilnya konsep efisiensi, ekonomi, efektivitas, dan ekuitas dapat mengidentifikasi kekurangan dalam proyek dengan lebih baik dan memberikan langkah-langkah perbaikan yang ditargetkan untuk proyek serupa di masa depan.

Tabel 1.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
dengan Penelitian Penulis

No.	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
1	Sylvia Febriany Gerungan, David P. E. Saerang, Winston Pontoh (2015) Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas • Variabel dependen: Alokasi Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat variabel tingkat ekonomi • Penelitian di provinsi Sulawesi Utara 	Tingkat efisiensi berpengaruh negatif signifikan, tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal	Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill” Vol. 6, No. 1, 2015:12-29 e-ISSN: 2715-1859
2	Kadek Martini, A. A. N. B. Dwirandra (2015) Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas • Variabel dependen: Alokasi belanja modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat variabel tingkat ekonomi • Penelitian di Provinsi Bali 	Tingkat efisiensi berpengaruh negatif signifikan, tingkat efektivitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap alokasi belanja	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.2 (2015):426-443 ISSN: 2302-8556

					modal	
3	Asepma Hygi Prihastuti, Taufeni Taufik, Restu Agusti (2015) Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Kinerja keuangan • Variabel dependen: Alokasi belanja modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian di Provinsi Riau 	Kinerja keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal	Jurnal SOROT, Volume 10, Nomor 2, Oktober 2015 halaman 143–154 e-ISSN: 2623-1875	
4	Lilis Marlina, Mirna Indriani, Heru Fahlevi (2017) Kinerja Keuangan dan Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Tingkat efektivitas • Variabel dependen: Alokasi Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat variabel tingkat ekonomi dan tingkat efisiensi • Penelitian di Provinsi Aceh 	Tingkat efektivitas berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal	Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Vol. 6, No. 1, 2017: 21-30 ISSN 2302-0164	
5	I Ketut Arsa, Nyoman Djinar Setiawina (2015) Pengaruh Kinerja Keuangan pada Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006 s.d. 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Tingkat efektivitas • Variabel dependen: Alokasi belanja modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat variabel tingkat ekonomi dan tingkat efisiensi • Penelitian di Provinsi Bali 	Tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal	Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 20 No. 2, Agustus 2015, 104-112 ISSN 2580-5312	
6	Ni Made Deni Indiyanti, Henny Rahyuda (2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Tingkat efisiensi dan tingkat 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat variabel tingkat ekonomi 	Tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas	E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 9,	

	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali	efektivitas • Variabel dependen: Alokasi belanja modal	• Penelitian di Provinsi Bali	berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal	2018: 4713-4746 ISSN: 2302-8912
7	Kurni Adi Suwandi, Afrizal Tahar (2015) Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening	• Variabel independen: Tingkat efektivitas • Variabel alokasi belanja modal	• Tidak terdapat variabel tingkat ekonomi dan efisiensi • Penelitian di Provinsi D. I. Yogyakarta	Tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal	Jurnal InFestasi Vol. 11, No.2, Desember 2015 Hal. 118-136 e-ISSN: 2460-8505
8	Havid Sularso, Yanuar E. Restianto (2011) Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	• Variabel independen: Kinerja keuangan • Variabel dependen: Alokasi belanja modal	• Penelitian di Provinsi Jawa Tengah	Kinerja keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal	Media Riset Akuntansi, Vol. 1 No. 2 Agustus 2011 ISSN 2088-2106
9	Muhammad Arif, Fefri Indra Arza (2019) Analisis Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi	• Variabel independen: Tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas • Variabel dependen: Alokasi belanja modal	• Tidak terdapat variabel tingkat ekonomi • Penelitian di Provinsi Sumatera Barat	Tingkat efisiensi berpengaruh positif signifikan, tingkat efektivitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap alokasi belanja	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 1, Seri A, Februari 2019, Hal 35-49 ISSN: 2656-3649 (Online)

	Sumatera Barat Tahun 2013- 2017			modal	
10	Rilo Jatitmas (2015) Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas • Variabel dependen: Alokasi belanja modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat variabel tingkat ekonomi • Penelitian di Provinsi Jawa Tengah 	Tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal	Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 11 No. 1 Maret 2015: 50–57 e-ISSN: 2656-3797
11	Eko Indra Praza (2016) Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Tingkat efektivitas • Variabel dependen: Alokasi belanja modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat variabel tingkat ekonomi dan tingkat efisiensi • Penelitian di Provinsi Jambi 	Tingkat efektivitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal	Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 4 No. 1, Juli-September 2016 ISSN: 2355-8520 (Online)
12	Damar Daru Sukmaji, Abdul Rohman (2019) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Tingkat efektivitas • Variabel dependen: Belanja modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat variabel tingkat ekonomi dan tingkat efisiensi • Penelitian di Provinsi Jawa Tengah 	Tingkat efektivitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal	Diponegoro Journal of Accounting Volume 8, Nomor 4, Tahun 2019, Halaman 1-9 ISSN (Online): 2337-3806
13	Muhammad Zulkarnain, Yulina Astuti, Erni Wiriani (2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Tingkat efektivitas • Variabel belanja 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat variabel tingkat ekonomi dan tingkat 	Tingkat efektivitas berpengaruh positif tidak signifikan	Jurnal Samudra Ekonomika Vol. 3, No. 1, April

	Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal di Kota Langsa	modal	efisiensi	terhadap belanja modal	2019 ISSN: 2549-4104
14	Aula Ahmad Hafidh (2013) Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik bagi Pertumbuhan Ekonomi	• Variabel independen: Tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas • Variabel belanja modal	• Tidak terdapat variabel tingkat ekonomi • Penelitian di Provinsi D. I. Yogyakarta	Tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal	Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 18, No. 2, Oktober 2013: 109-120 e-ISSN: 2528-6722
15	Riri Zelmianti (2016) Pendekatan Teori Keagenan pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi pada Provinsi di Indonesia)	• Variabel independen: Tingkat efektivitas • Variabel dependen: Alokasi belanja modal • Penelitian pada pemerintah provinsi di Indonesia	• Tidak terdapat variabel tingkat ekonomi dan tingkat efisiensi	Tingkat efektivitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal	JRAK.Vol. 7 No.1 Februari 2016 Hal. 11-21 e-ISSN: 2581-2343
16	Riko Novianto, Rafiudin Hanafiah (2015) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	• Variabel independen: Tingkat efektivitas • Variabel dependen: Alokasi belanja modal	• Tidak terdapat variabel tingkat ekonomi dan tingkat efisiensi • Penelitian di Provinsi Kalimantan Barat	Tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal	Jurnal Ekonomi Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2015 ISSN: 2302-7169
17	Julius	• Variabel	• Tidak terdapat	Tingkat	Jurnal Riset

	Tamawiyw, Jullie J. Sondakh, Jessy D. L. Warongan (2016) Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik	independen: Tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas • Variabel dependen: Belanja modal	variabel tingkat ekonomi • Penelitian di Provinsi Sulawesi Utara	efisiensi dan tingkat efektivitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal	Akuntansi dan Auditing “Goodwill” Vol. 7, No. 2, 2016:103- 124 e-ISSN: 2715-1859
18	Anisya Ayu L., Sri Rahayu, Junaidi (2019) Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening	• Variabel independen: Tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas • Variabel alokasi belanja modal	• Tidak terdapat variabel tingkat ekonomi • Penelitian di Provinsi Jambi	Tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal	Jurnal Akuntansi dan Keuangan UNJA Vol. 4 No. 2 2019:1-15 ISSN: 2460-6235
19	Lufki Laila Nurhidayati, Rizal Yaya (2013) Alokasi Belanja Modal untuk Pelayanan Publik: Praktik di Pemerintah Daerah	• Variabel independen: Tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas • Variabel dependen: Alokasi belanja modal	• Tidak terdapat variabel tingkat ekonomi • Penelitian pada 142 pemerintah kabupaten/kot a di Indonesia	Tingkat efisiensi berpengaruh positif tidak signifikan, tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal	JAAI Vol. 17 No. 2, Desember 2013: 102- 114 e-ISSN: 2528-6528
20	Dihan Lucky (2013) <i>Analysis of The Effect of Regional Financial Performance to Economy</i>	• Variabel independen: Kinerja keuangan • Variabel belanja modal	• Penelitian di Provinsi Jawa Timur	Kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	<i>Journal of Economics and Sustainable Developme nt, Vol. 4, No.19, 2013</i>

	<i>Growth and Poverty Through Capital Expenditure</i>				ISSN 2222-2855 (Online)
21	Kornelis Kopong Bolen, Payamta (2019) <i>The Effect of Financial Performance and Balanced Funds on Capital Expenditure of Local Government in District/City in Indonesia</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas • Variabel dependen: Alokasi belanja modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat variabel tingkat ekonomi • Penelitian pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia 	Tingkat efisiensi berpengaruh positif tidak signifikan, tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal	<i>Journal of Public Administration and Governance, Vol. 9, No. 4, 2019</i> ISSN 2161-7104 doi:10.5296/jpag.v9i4.15583
22	Abel Nyarko-Asomani, Vijay K. Bhasin, Peter B. Aglobitse (2019) <i>Government Capital Expenditure, Recurrent Expenditure, and Economy Growth in Ghana</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel belanja modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat variabel kinerja keuangan • Penelitian di Ghana 	Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.	<i>Ghanaian Journal of Economics, Vol. 7(1), December 2019: 44-70</i> ISSN: 2309-8945
23	Xuhui Cong, Li Ma (2018) <i>Performance Evaluation of Public-Private Partnership Projects from the Perspective of Efficiency, Economy, Effectiveness, and Equity: A Study of Residential Renovation Projects in</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel efisiensi, ekonomi, dan efektivitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat variabel alokasi belanja modal • Penelitian pada proyek kerja sama pemerintah-swasta di Tiongkok 	Evaluasi kinerja berdasarkan efisiensi, ekonomi, efektivitas, dan ekuitas dapat mengevaluasi kinerja dengan lebih baik.	<i>Sustainability</i> 2018, 10, 1951; doi:10.3390/su10061951

China

Anggia Emqi Anggriani (2021) 173403076

Pengaruh Kinerja Keuangan Berbasis *Value for Money* (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas) terhadap Alokasi Belanja Modal (Sensus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2019)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Kinerja Keuangan Berbasis *Value For Money* (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas) terhadap Alokasi Belanja Modal (Sensus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2019)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kinerja keuangan berbasis *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) serta alokasi belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2015-2019.
2. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan berbasis *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2015-2019 secara parsial maupun bersama-sama.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan berbasis *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) serta alokasi belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2015-2019.

2. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan berbasis *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2015-2019 secara parsial maupun bersama-sama.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan memperdalam pemahaman khususnya mengenai kinerja keuangan berbasis *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) serta alokasi belanja modal.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan, juga sebagai pemicu agar pengelolaan keuangan daerah dapat lebih ekonomis, efisien, dan efektif, serta pengalokasian belanja dapat lebih berorientasi pada kepentingan publik.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pembanding dan petunjuk bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan berbasis *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) serta alokasi belanja modal, juga memberikan informasi bagi masyarakat mengenai kinerja

keuangan berbasis *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) serta alokasi belanja modal.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan pada penelitian ini ialah pemerintah provinsi se-Indonesia tahun 2015-2019.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Mei 2021 (terlampir).